EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENANGANI ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN PERBATASAN INDONESIA

Hermanus Marang Temaluru¹, Yohanes Arman²
adepatemaluru@gmail.com¹, nanaarman54@gmail.com²
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum nasional Indonesia dalam menangani illegal fishing di perairan perbatasan. Dengan metode penelitian hukum normatif, analisis difokuskan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang kuat telah tersedia, implementasi masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, perlindungan nelayan lokal yang kurang memadai, dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Keterbatasan teknologi pemantauan, terutama di wilayah terpencil, juga memberikan celah bagi pelaku illegal fishing. Diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan investasi dalam teknologi pemantauan, penguatan koordinasi antarlembaga, konsistensi penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan efektivitas. Penguatan kerjasama internasional juga penting dalam mengatasi illegal fishing lintas batas negara. Dengan pendekatan komprehensif, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif melindungi sumber daya laut dari ancaman illegal fishing.

Kata Kunci: Illegal fishing, Kebijakan hukum, Perairan perbatasan, Penegakan hukum, Kerjasama internasional

ABSTRACT

This study evaluates the effectiveness of Indonesia's national legal policies in addressing illegal fishing in border waters. Using a normative legal research method, the analysis focuses on Law No. 45 of 2009 on Fisheries, Presidential Regulation No. 115 of 2015 on the Task Force for Combating Illegal Fishing (Satgas 115), and Law No. 17 of 1985 on the Ratification of UNCLOS. Findings indicate that despite having a strong legal framework, implementation faces challenges such as resource limitations, suboptimal inter-agency coordination, inadequate protection for local fishermen, and inconsistencies in law enforcement. Technological monitoring limitations, particularly in remote areas, also provide opportunities for illegal fishing activities. Concrete steps are needed to enhance effectiveness, including increased investment in monitoring technology, strengthened inter-agency coordination, consistent law enforcement, and heightened public awareness. Strengthening international cooperation is also crucial to address cross-border illegal fishing. With a comprehensive approach, Indonesia aims to effectively protect its marine resources from the threat of illegal fishing.

Keywords: *Illegal fishing, Legal policies, Border waters, Law enforcement, International cooperation.*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah perairan yang mencapai sekitar 5,8 juta kilometer persegi, memegang peranan penting dalam konteks global maupun regional. Keberadaan wilayah perairan yang luas ini tidak hanya menjadi sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga menimbulkan sejumlah tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan penegakan hukum di laut. Posisi geografis strategis Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua menjadikannya titik fokus

utama bagi berbagai praktik penangkapan ikan ilegal, atau yang lebih dikenal dengan illegal fishing. Fenomena ini bukan sekadar ancaman terhadap kedaulatan negara, tetapi juga mempengaruhi keberlanjutan ekosistem laut yang kaya akan biodiversitas, serta mengancam kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir, terutama di wilayah-wilayah perbatasan yang rawan.

Praktik illegal fishing telah menjadi permasalahan serius yang memerlukan respon yang komprehensif dari pemerintah dan masyarakat sipil. Kerugian ekonomi yang diakibatkannya mencakup kerugian langsung dari hasil tangkapan yang hilang dan berpotensi mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Selain itu, dampaknya terhadap ekosistem laut sangat merugikan, mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, praktik ilegal ini juga mempengaruhi mata pencaharian nelayan lokal yang bergantung pada kelimpahan hasil laut di perairan sekitar mereka. Oleh karena itu, penanganan illegal fishing bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Fenomena illegal fishing merupakan masalah yang tidak hanya memiliki dampak ekonomi yang signifikan, tetapi juga menjangkau aspek sosial dan lingkungan yang lebih luas. Secara ekonomi, praktik ini menyebabkan kerugian yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, merusak potensi ekonomi yang seharusnya dapat diperoleh dari sumber daya ikan yang berkelanjutan. Sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang untuk kepentingan nasional menjadi terkuras akibat illegal fishing yang tidak terkontrol. Dari segi sosial, praktik ini mengancam mata pencaharian ribuan nelayan lokal yang bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Ketidakpastian atas tangkapan ikan yang dihasilkan oleh illegal fishing mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial di komunitas pesisir, menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan peningkatan risiko kemiskinan di daerah-daerah terpencil.

Dampak dari illegal fishing juga sangat merugikan dari perspektif lingkungan, mengancam keberlanjutan ekosistem laut yang rentan dan mengganggu keseimbangan alam serta keanekaragaman hayati yang melimpah di perairan Indonesia. Aktivitas illegal fishing tidak hanya berdampak pada populasi ikan yang sudah terancam, tetapi juga pada ekosistem laut secara keseluruhan. Penggunaan teknik penangkapan yang merusak seperti trawl berat dapat merusak habitat terumbu karang dan ekosistem bawah laut lainnya, mengancam keberlanjutan lingkungan laut jangka panjang. Di samping itu, illegal fishing juga memiliki potensi untuk memicu konflik di wilayah perbatasan yang sensitif, meningkatkan ketegangan antar negara dan memperburuk masalah keamanan serta diplomasi regional. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap perikanan laut yang legal dan berkelanjutan merupakan keharusan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Untuk mengatasi tantangan illegal fishing, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis melalui kebijakan hukum nasional. Salah satu langkah penting adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini dirancang untuk memperkuat kerangka hukum dalam pengelolaan perikanan dan memberikan landasan yang lebih kuat untuk penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing. Melalui regulasi ini, pemerintah berusaha menciptakan sistem pengelolaan perikanan yang lebih teratur dan adil, serta memperketat pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran.

Selain mengeluarkan berbagai undang-undang, pemerintah Indonesia juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 yang mendirikan Satuan Tugas

Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Satgas ini memiliki peran yang krusial dalam mengoordinasikan upaya berbagai instansi pemerintah yang terkait dalam pemberantasan illegal fishing. Pendekatan yang digunakan oleh Satgas 115 adalah pendekatan multi-instansi, yang berarti melibatkan kerjasama lintas lembaga seperti TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga-lembaga lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam memerangi illegal fishing dapat berjalan dengan lebih efektif dan terkoordinasi, meminimalisir tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi. Satgas ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum dengan menangkap dan menindak para pelaku illegal fishing, tetapi juga berperan dalam upaya pencegahan melalui pengawasan yang ketat dan tindakan preventif lainnya. Pengawasan ketat dilakukan dengan patroli rutin di wilayah perairan yang rawan, penggunaan teknologi pemantauan modern, serta edukasi kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Melalui kombinasi penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan yang komprehensif, diharapkan illegal fishing dapat ditekan secara signifikan, sehingga sumber daya kelautan Indonesia dapat terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Ratifikasi ini tidak hanya menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hukum laut internasional, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kokoh bagi negara ini dalam menjaga kedaulatan dan yurisdiksinya di perairan yang luas. UNCLOS memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan sumber daya laut, termasuk upaya untuk mencegah dan mengendalikan illegal fishing yang merugikan.

Dengan memiliki basis hukum internasional yang kuat seperti UNCLOS, Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani kasus illegal fishing, khususnya di wilayah perbatasan yang sering kali menjadi titik rawan pelanggaran. UNCLOS mengatur tentang hak dan kewajiban negara-negara dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya laut, serta dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di perairan mereka. Melalui implementasi UNCLOS, Indonesia dapat menegakkan aturan-aturan yang lebih tegas terhadap praktik illegal fishing, baik dalam hal pengawasan, penegakan hukum, maupun kerja sama internasional untuk memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan keamanan wilayah perairannya.

Meskipun berbagai kebijakan hukum telah diterbitkan untuk menanggulangi illegal fishing, tantangan dalam implementasinya masih sangat signifikan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan untuk mengawasi luasnya wilayah perairan Indonesia. Pengawasan yang efektif menjadi sulit dilakukan karena infrastruktur yang terbatas dan kurangnya alat teknologi canggih untuk memantau aktivitas di laut secara real-time. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait seperti kepolisian, angkatan laut, dan lembaga pemerintah lainnya belum sepenuhnya optimal, yang berdampak pada kesulitan dalam menyatukan upaya penegakan hukum. Kompleksitas masalah semakin bertambah di wilayah perbatasan, di mana konflik kepentingan antara negara tetangga sering kali muncul dan tantangan diplomatik menambah kerumitan dalam menangani illegal fishing secara efektif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Metode ini sangat penting dalam studi hukum karena berfokus

pada kajian terhadap bahan hukum yang ada, baik itu bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Dalam konteks ini, metode penelitian hukum normatif digunakan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan upaya pemberantasan illegal fishing di Indonesia. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji efektivitas dan implementasi berbagai kebijakan hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kerangka hukum yang ada dapat diperkuat dan diperbaiki untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang di sektor perikanan.

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, yang merupakan teknik pengumpulan data yang komprehensif dan sistematis. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982. Selain itu, peneliti juga menelaah literatur ilmiah, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang membahas masalah illegal fishing serta implementasi kebijakan hukum di Indonesia. Penggunaan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai kerangka hukum yang ada serta tantangan dalam implementasinya. Studi kepustakaan ini juga mencakup analisis terhadap dokumen resmi, laporan dari lembaga pemerintahan, dan publikasi akademik yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang melibatkan interpretasi mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membandingkannya dengan teori-teori hukum yang relevan. Peneliti mengevaluasi bagaimana undang-undang dan peraturan tersebut diimplementasikan dalam praktik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing. Dalam proses ini, peneliti juga mempertimbangkan pandangan dan pendapat dari berbagai pihak, termasuk ahli hukum, akademisi, praktisi di bidang perikanan dan kelautan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta untuk mengidentifikasi peluang perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Hasil dari penelitian hukum normatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum di bidang perikanan dan kelautan. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun strategi yang lebih efektif dan efisien untuk memberantas illegal fishing. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum, sehingga upaya pemberantasan illegal fishing dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan sistematis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi akademisi dan praktisi hukum mengenai pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan terpadu dalam menangani masalah illegal fishing di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan, tetapi juga memperkaya literatur akademik dan memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut di bidang hukum perikanan dan kelautan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Muatan Peraturan Hukum tentang Illegal Fishing

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan revisi yang substansial dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di Indonesia. Implementasi undang-undang ini memiliki harapan yang mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, terdapat peningkatan pengawasan yang ketat terhadap izin penangkapan ikan, dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang mematuhi peraturan yang diberikan izin untuk menangkap ikan. Kedua, pemberian sanksi yang tegas dan konsisten kepada pelaku illegal fishing diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi frekuensi pelanggaran tersebut. Ketiga, undang-undang ini juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada nelayan lokal, menjamin mereka mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya perikanan dan menghindari kerugian akibat dari kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh pihak asing atau nelayan ilegal.

Apabila dilihat dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menandai langkah signifikan dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Revisi ini menguatkan perangkat hukum yang ada dengan fokus pada pengawasan yang lebih intens terhadap izin penangkapan ikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses penangkapan ikan hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang mematuhi standar yang ditetapkan, sehingga menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku illegal fishing diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran, melalui pemberian sanksi yang konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap nelayan lokal juga menjadi fokus utama, dengan menjamin mereka mendapatkan bagian yang adil dari sumber daya perikanan dan tidak terpinggirkan oleh praktik-praktik ilegal yang merugikan.

Dalam konteks implementasi nyata, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 memainkan peran penting dalam mengubah paradigma pengelolaan perikanan di Indonesia. Perubahan tersebut mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap proses perizinan penangkapan ikan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang memenuhi syarat yang dapat mengakses sumber daya perikanan. Langkah-langkah penegakan hukum yang lebih kuat terhadap praktik illegal fishing diharapkan mampu menekan aktivitas ilegal tersebut, dengan memberikan sanksi yang sesuai dan efektif terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, undang-undang ini juga berperan dalam memberikan jaminan perlindungan kepada nelayan lokal, agar mereka dapat menikmati hak akses yang adil terhadap sumber daya perikanan tanpa terancam oleh aktivitas ilegal yang merugikan.

2. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115)

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 mengatur pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dalam mengatasi praktik illegal fishing. Langkah-langkah strategis yang diimplementasikan mencakup kolaborasi aktif antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian. Melalui operasi bersama yang terkoordinasi, upaya penegakan hukum di lapangan dapat dioptimalkan, memastikan bahwa respons terhadap laporan dan deteksi aktivitas illegal fishing dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Selain itu, penerapan

pertukaran informasi yang efektif juga menjadi fokus utama, sehingga setiap tindakan penegakan hukum, seperti penangkapan dan penyitaan kapal, dapat dilakukan secara tegas dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan tersebut juga mengharapkan adanya koordinasi yang sinergis antar instansi terkait guna menjamin kepatuhan terhadap regulasi perikanan. Dengan demikian, Satgas 115 bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih terstruktur dan berdaya guna, di mana tindakan pencegahan dan penindakan terhadap illegal fishing dapat dilakukan secara efektif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas penegakan hukum nasional dalam menghadapi tantangan illegal fishing, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya laut yang penting bagi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Presiden ini tidak hanya mencakup aspek operasional, tetapi juga mendorong transparansi dalam proses penegakan hukum sebagai landasan utama untuk mencapai tujuan perlindungan sumber daya laut secara menyeluruh.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 telah mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, sebuah dokumen penting yang memberikan landasan hukum internasional bagi negara-negara untuk mengelola wilayah laut dan sumber daya maritim mereka. Indonesia berharap bahwa dengan meratifikasi UNCLOS ini, posisi negara dalam mempertahankan kedaulatan dan yurisdiksinya atas wilayah perairan dapat diperkuat. Implementasi UNCLOS mencakup berbagai aspek yang krusial bagi Indonesia. Pertama, UNCLOS memberikan landasan yang jelas dalam menetapkan batas-batas wilayah perairan Indonesia, yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga. Kedua, UNCLOS menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal. Ketiga, ratifikasi UNCLOS mendorong kerjasama internasional melalui perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara-negara sekitar serta partisipasi aktif dalam forum-forum internasional yang membahas isu-isu maritim.

Dalam konteks ini, UNCLOS menjadi instrumen hukum yang tidak hanya mengatur kedaulatan dan keamanan, tetapi juga mempromosikan keberlanjutan ekologis dan kerjasama internasional. Dengan menegakkan ketentuan-ketentuan UNCLOS, Indonesia dapat lebih efektif melindungi sumber daya lautnya dari eksploitasi yang tidak berkelanjutan serta mengatasi tantangan seperti illegal fishing. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, Indonesia dapat memperluas cakupan penegakan hukum maritimnya, memperkuat posisi diplomatis dalam forum-forum global, dan memperluas kerjasama teknis dengan negara-negara mitra untuk pengelolaan sumber daya laut yang lebih efektif.

B. Problem Penerapan Peraturan Hukum terkait Illegal Fishing

Setiap bagian dari peraturan ini memunculkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga koordinasi antarlembaga, serta perluasan kerjasama internasional. Dalam analisis berikut, akan dibahas secara lebih mendetail mengenai setiap aspek tersebut untuk memperkuat pemahaman tentang dinamika dan permasalahan seputar penanggulangan illegal fishing di perairan Indonesia:

1. Penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang merupakan revisi substansial dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini memberikan landasan yang kuat untuk mengatasi praktik illegal fishing, namun tantangan utama terletak

pada implementasi di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dalam sistem penegakan hukum. Meskipun Satgas 115 telah dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian, keberhasilannya terbatas oleh kapasitas terbatas dalam hal personel, anggaran, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengawasi dan menindak praktik illegal fishing secara efektif. Hal ini mengakibatkan tantangan dalam mendeteksi dan menanggulangi aktivitas illegal fishing secara menyeluruh di seluruh wilayah perairan Indonesia.

2. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 yang mendirikan Satgas 115 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan illegal fishing dengan mengintegrasikan berbagai lembaga pemerintah seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian. Satgas ini seharusnya menciptakan kerjasama yang sinergis untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala signifikan seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Hal ini menghambat respons yang cepat dan efisien terhadap laporan serta deteksi aktivitas illegal fishing. Misalnya, terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan atau lambatnya pertukaran informasi antarlembaga, yang mengurangi kemampuan untuk merespons dengan tepat waktu terhadap pelanggaran yang terdeteksi.
3. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi merupakan tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia. Meskipun telah ada upaya untuk menerapkan teknologi canggih seperti sistem pemantauan kapal (VMS) dan satelit, implementasinya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah perairan yang luas dan terpencil, seperti di perbatasan atau di pulau-pulau terluar, sering kali tidak tercakup dengan baik dalam sistem pemantauan ini. Hal ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku illegal fishing untuk beroperasi tanpa terdeteksi atau diawasi secara ketat oleh otoritas. Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai memperlambat respons penegakan hukum dan memungkinkan pelaku illegal fishing untuk menghindari penangkapan atau sanksi yang pantas. Dengan demikian, peningkatan infrastruktur dan investasi dalam teknologi pengawasan menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi praktik illegal fishing di seluruh wilayah perairan Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan regulasi terkait seharusnya memberikan perlindungan yang kuat kepada nelayan lokal dari dampak negatif illegal fishing. Namun, dalam kenyataannya, nelayan lokal sering kali menjadi korban utama akibat persaingan yang tidak sehat dengan nelayan ilegal atau kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Persaingan yang tidak adil ini tidak hanya mengancam keberlangsungan ekonomi nelayan lokal dengan mengurangi hasil tangkapan mereka, tetapi juga mengakibatkan kerugian sosial yang signifikan, seperti pengangguran, migrasi paksa, dan penurunan kualitas hidup di komunitas pesisir. Selain itu, nelayan lokal sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan pasar yang dimiliki oleh pelaku illegal fishing, yang menguatkan ketidaksetaraan dalam persaingan di sektor perikanan. Oleh karena itu, perlindungan yang lebih efektif dan implementasi yang ketat dari regulasi perikanan diperlukan untuk mengurangi dampak negatif ini dan memastikan keberlanjutan ekonomi serta sosial nelayan lokal di Indonesia.
5. Meskipun hukum telah menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku illegal fishing,

dalam praktiknya, penerapan sanksi sering kali tidak konsisten karena beberapa faktor yang kompleks. Ketidakpastian hukum menjadi salah satu faktor utama yang menghambat proses penegakan hukum yang adil dan efektif. Interpretasi yang beragam terhadap undang-undang dan peraturan, terutama di tingkat lokal, sering kali membingungkan para penegak hukum dan menghasilkan keputusan yang tidak konsisten dalam penanganan kasus illegal fishing. Di samping itu, masalah korupsi di beberapa tingkatan penegakan hukum juga mempengaruhi efektivitas sanksi. Praktik korupsi dapat mempengaruhi proses penyelidikan, pengadilan, dan penjatuhan hukuman sehingga pelanggar hukum dapat lolos dari pertanggungjawaban dengan mudah atau menerima hukuman yang tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan. Hal ini tidak hanya merugikan dalam hal keadilan, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana pelaku illegal fishing merasa dapat melanggar hukum tanpa konsekuensi yang serius, memperburuk masalah dan memperpanjang periode ketidakstabilan dalam upaya pemberantasan illegal fishing.

6. Ratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 seharusnya menjadi pijakan penting dalam memperkuat kerjasama internasional untuk mengatasi illegal fishing. UNCLOS memberikan landasan hukum yang jelas bagi Indonesia dalam menegakkan kedaulatan dan yurisdiksinya atas wilayah perairan, serta mendorong kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi kerjasama ini menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Indonesia, meskipun aktif dalam forum-forum internasional dan memiliki sejumlah perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga, masih perlu meningkatkan koordinasi operasional dan pertukaran informasi lintas batas. Ini penting untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap kasus-kasus illegal fishing yang melintasi perbatasan negara, serta untuk menguatkan kapasitas penegakan hukum maritim di wilayah-wilayah terpencil dan rawan di Indonesia.

C. Efektivitas Penerapan Kebijakan Hukum dalam Menangani Illegal Fishing

Dalam upaya mengatasi tantangan illegal fishing di perairan Indonesia, berbagai peraturan hukum telah diterapkan, mulai dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengatur pengelolaan perikanan hingga pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Namun, meskipun telah ada langkah-langkah strategis, implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum masih menjadi perhatian utama. Berikut merupakan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi efektivitas dalam menangani illegal fishing di Indonesia:

1. Penguatan Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 memberikan landasan yang kuat untuk mengatasi illegal fishing di Indonesia dengan fokus pada pengawasan ketat terhadap izin penangkapan ikan dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku ilegal. Namun, meskipun kerangka hukum ini sudah ada, tantangan utamanya terletak pada implementasi yang efektif di lapangan. Salah satu permasalahan yang masih harus diatasi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dalam sistem penegakan hukum. Satgas 115 yang dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian, merupakan langkah positif namun masih memerlukan peningkatan dalam hal kapasitas personel, anggaran, dan infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap illegal fishing.

2. Peran Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 dalam Koordinasi Antar Kementerian

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, yang mengatur pembentukan Satgas 115, dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan illegal fishing di Indonesia melalui kolaborasi aktif antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan lembaga terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya, tantangan utama muncul dari birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antarlembaga yang sering kali menghambat respons yang cepat dan efisien terhadap laporan serta deteksi aktivitas illegal fishing. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pembentukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif, standarisasi prosedur operasional, dan peningkatan pertukaran informasi yang lebih cepat antarlembaga. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kapasitas Satgas 115 dalam melakukan operasi penegakan hukum, tetapi juga memastikan bahwa tindakan pencegahan dan penindakan terhadap illegal fishing dapat dilakukan secara terkoordinasi dan transparan di seluruh wilayah perairan Indonesia.

3. Tantangan Teknis dalam Implementasi Teknologi Pemantauan

Keterbatasan infrastruktur dan teknologi menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia. Meskipun pemerintah telah berupaya menerapkan teknologi canggih seperti sistem pemantauan kapal (VMS) dan satelit, implementasinya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki perairan luas dan terpencil, terutama di perbatasan dan pulau-pulau terluar. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku illegal fishing untuk beroperasi tanpa terdeteksi atau diawasi secara ketat oleh otoritas. Dibutuhkan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur dan teknologi pemantauan, termasuk peningkatan jaringan pemantauan di wilayah-wilayah terpencil, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas illegal fishing di seluruh Indonesia.

4. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Lokal

Perlindungan terhadap nelayan lokal dari dampak negatif illegal fishing menjadi aspek penting dalam kebijakan perikanan Indonesia. Nelayan lokal sering kali menjadi korban utama akibat persaingan yang tidak sehat dengan nelayan ilegal atau kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Perlindungan ini tidak hanya meliputi keamanan ekonomi mereka tetapi juga akses yang adil terhadap sumber daya perikanan. Diperlukan kebijakan yang memastikan bahwa nelayan lokal mendapatkan perlindungan hukum yang cukup serta dukungan dalam pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan mereka.

5. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Transparan

Konsistensi dalam penerapan hukum terhadap pelaku illegal fishing serta transparansi dalam proses penegakan hukum menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ketidakpastian hukum, seperti interpretasi yang berbeda-beda terhadap undang-undang dan peraturan, dapat membingungkan para penegak hukum dan menghasilkan keputusan yang tidak konsisten dalam penanganan kasus-kasus illegal fishing. Selain itu, praktik korupsi di beberapa tingkatan penegakan hukum juga dapat mempengaruhi integritas dan efektivitas proses penegakan hukum terhadap illegal fishing. Diperlukan upaya untuk mengurangi ambiguitas hukum serta memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk mencegah dan mengatasi korupsi dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia.

6. Penguatan Kerjasama Internasional melalui UNCLOS

Ratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, yang diimplementasikan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, merupakan langkah penting dalam memperkuat kerangka hukum yang mengatur kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia atas wilayah perairannya. UNCLOS memberikan landasan hukum

yang jelas dalam menetapkan batas-batas wilayah laut Indonesia, termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang penting untuk pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu, UNCLOS menegaskan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, yang mendukung upaya Indonesia dalam melindungi ekosistem laut yang penting bagi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Di samping itu, UNCLOS juga mendorong kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya laut dan penegakan hukum. Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional terkait dan memiliki sejumlah perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga untuk memperkuat kerjasama dalam mengatasi illegal fishing. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan illegal fishing yang melintasi batas negara, diperlukan peningkatan yang signifikan dalam koordinasi operasional dan pertukaran informasi lintas batas. Hal ini akan memastikan respons yang cepat dan koordinasi yang efektif antara otoritas penegak hukum dari berbagai negara dalam menanggapi dan menindak kasus illegal fishing secara komprehensif. Dengan demikian, implementasi UNCLOS di Indonesia tidak hanya tentang penegakan hukum nasional tetapi juga tentang memperkuat kerjasama regional dan internasional dalam upaya bersama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut global.

7. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Edukasi

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari illegal fishing dan edukasi tentang keberlanjutan sumber daya perikanan merupakan strategi penting dalam upaya pencegahan praktik ilegal ini di Indonesia. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat lebih memahami bahwa illegal fishing tidak hanya merugikan bagi ekonomi dan keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga berdampak negatif pada ekosistem laut secara keseluruhan. Dengan meningkatkan pemahaman ini, diharapkan masyarakat akan lebih proaktif dalam memantau dan melaporkan kegiatan illegal fishing kepada otoritas terkait, sehingga dapat membantu mengurangi frekuensi praktik ilegal ini secara signifikan.

Selain itu, edukasi tentang keberlanjutan sumber daya perikanan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan perlunya menjaga ekosistem laut yang menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Dengan memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut, masyarakat akan lebih cenderung mendukung upaya-upaya pemerintah dalam melindungi sumber daya perikanan dari eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Edukasi ini juga dapat mendorong adopsi praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan di kalangan nelayan lokal dan memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan perlindungan laut yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat dan edukasi tentang keberlanjutan sumber daya perikanan merupakan langkah krusial dalam membangun kesadaran kolektif dan dukungan untuk melindungi ekosistem laut Indonesia dari tantangan illegal fishing.

KESIMPULAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan signifikan dalam menangani illegal fishing di wilayah perairannya yang luas. Meskipun telah ada kerangka hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), implementasi efektif dari kebijakan-kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap praktik illegal fishing. Koordinasi antarlembaga pemerintah, meskipun telah ditingkatkan melalui pembentukan Satgas 115, masih

menghadapi tantangan dalam hal birokrasi yang kompleks dan kurangnya komunikasi yang efektif.

Perlindungan terhadap nelayan lokal dan penegakan hukum yang konsisten masih menjadi isu krusial. Nelayan lokal sering menjadi korban utama dari persaingan tidak sehat dengan pelaku illegal fishing, sementara inkonsistensi dalam penerapan hukum dan adanya praktik korupsi mengurangi efektivitas upaya pemberantasan illegal fishing. Ratifikasi UNCLOS melalui UU No. 17 Tahun 1985 telah memberikan landasan hukum internasional yang kuat bagi Indonesia, namun implementasi kerjasama internasional dalam menangani illegal fishing masih perlu ditingkatkan.

Keterbatasan teknologi pemantauan, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan, menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku illegal fishing untuk beroperasi tanpa terdeteksi. Hal ini sering kali menghambat respons cepat terhadap laporan aktivitas illegal fishing. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif illegal fishing dan pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan juga menjadi tantangan dalam upaya pencegahan praktik ilegal ini.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan illegal fishing, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan investasi dalam teknologi pemantauan, penguatan koordinasi antarlembaga, konsistensi dalam penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi. Selain itu, penguatan kerjasama internasional dan regional juga penting untuk mengatasi illegal fishing yang sering melintasi batas negara. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi sumber daya lautnya dari ancaman illegal fishing, menjaga keberlanjutan ekosistem laut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiananda, I Dewa Ayu Maheswari, I Gede Eggy Bintang Pratama, and Ida Ayu Brahmantari Manik Utama. "Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 8, no. 2 (2019).
- Anggito, Albi. "Metode Penelitian Kualitatif." Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Bormasa, Adolof, John Dirk Pasalbessy, and Erwin Ubwarin. "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara." *PATTIMURA Legal Journal* Vol. 1, no. 1 (2022).
- Fernandes, Inggrit. "Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan." *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 17, no. 1 (2017).
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review* Vol. 5, no. 1 (2020).
- Marzuki, Mahmud. "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhamad, Simela Victor. "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan." *Politica* Vol. 3, no. 1 (2012).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, n.d.
- Putri, Merisa Nur. "Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 11, no. 1 (2020).
- Salsabila, Aldhanalia Pramesti. "Pengoptimalan Satgas 115 Dengan Model Koordinasi Satgas Pusat Dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* Vol. 2, no. 1 (2018).
- Setyadi, I. Y. "Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Susetyorini, Peni. "Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 48, no. 2 (2019)
- Yturriaga, Jose A De. *The International Regime Of Fisheries*. Kluwer Law International. Cambridge,

1997.